

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Starta(S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

ANNISA RAHMAWANI

11675200353

PROGRAM S.1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANNISA RAHMAWANI
 NIM : 11675200353
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA (BPD) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR
 HULU KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
 NIK: 130712074

MENGETAHUI

WAKIL DEKAN I
 EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

KETUA JURUSAN
 ADMINISTRASI NEGARA



Dr. Ni. Leny Nofianti MS,SE, M.Si,Ak, CA
 NIP: 19751112 199903 2 001

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP:19790101 200710 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Cipta yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya mengancam hak cipta yang bersangkutan.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Annisa Rahmawani
 NIM : 11675200353
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Ilmu Sosial/Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten
 Kampar
 Tanggal Ujian : 23 April 2020

Disetujui Oleh,

Ketua Penguji

Fakhrurrozi, SE. MM
NIP. 19670725 200003 1 002

Mengetahui,

Penguji I

Ratna Dewi. S.Sos.M.Si
NIP.19811030 200710 2 004

Penguji II

Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc
NIK. 130 717 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Annisa Rahmawani

**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2020**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salahsatu lembaga desa yang merupakan mitra pemerintah desa . BPD memiliki fungsi dan peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu fungsi legislasi, perwakilan, dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi BPD dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi perwakilan adalah fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Fungsi pengawasan adalah fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Adapun pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan BPD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu serta kendala dalam menjalankan fungsi BPD. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis data pada penelitian adalah bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari studi lapangan dan literature untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian menjadi sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa menunjukan bahwa sudah ada peraturan yang dibuat. Pelaksanaan fungsi BPD tentang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan karena masih adanya kendala-kendala yang dialami BPD. Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa dikatakan hanya cukup baik. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung sudah dikatakan cukup baik tapi masih jauh dari kata optimal dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang belum bisa diatasi oleh BPD Desa Tanjung.

Kata Kunci: Fungsi Legislasi, Perwakilan, Pengawasan



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang mana berkat rahmat dan karunian-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Shallahu Alahi Wasalam yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam. penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu kepada Allah Subhanahu Wata'ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tersayang, Ibunda Kliwalni dan Ayahanda Abdul Rahman yang senantiasa membimbing, motivasi, memberikan kasih sayang dan do'a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, semoga menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara, Semoga Jurusan Administrasi Negara Semakin Jaya Selalu.
4. Bapak Candra Jon Asmara selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan semangat dan nasehat yang luar biasa kepada penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau selalu membantu penulis dalam melengkapi administrasi surat-menyurat.
6. Bapak/Ibu Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Tanjung yang bersedia meluangkan waktu untuk dapat melakukan wawancara dan memperoleh data, informasi terkait penelitian.
7. Untuk Adikku tersayang Putri Melati Hesarani yang telah memberikan dukungan dan nasehat yang luar biasa sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan kuliah.
8. Untuk Sahabat-sahabatku MB Squad Ardi Mursyidi, Ilham Akbar, Deni Sabrian, Randi Gusfirnando, Mulia Anggraini, Shinta Fasalia, Meiman Jaya, Syahidul Akbar, Muhammad Toha, Yuhan Firmansyah, Yoma Kurnia Putra. Terimakasih sudah memberikan dukungan dan memberikan warna indah dalam hidupku, Semangat berjuang untuk kita dalam menyelesaikan perkuliahan, semoga ukhuwah Persahabatan ini di berkahi Allah Subhanahu wata'ala dan tetap terjaga.
9. Untuk Sahabat seperjuangan selama kuliah Nurul Lovi Andini, Nadela Pratiwi, Asri Dwi Wahyuni, Vivi Sunarti, Lili Frab Siska Dewi. Terimakasih telah menemani masa-masa sulit drama perkuliahan ini dan saling menguatkan sehingga kita dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Untuk teman-teman Administrasi Negara Kelas D Angkatan 2016 yang sudah berjuang bersama –sama dari awal semester hingga akhir yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang menyelesaikan tugas dunia ini semoga tetap menjadi keluarga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang baik. Demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Maret 2020

ANNISA RAHMAWANI

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kebijakan Publik	12
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	13
2.3 Pengertian Desa.....	20
2.3.1 Kewenangan Desa	23
2.3.2 Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	24
2.3.3 Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa.....	25
2.3.4 Peraturan Desa.....	26
2.4 Badan Permusyawaratan Desa	28
2.4.1 Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	31
2.4.2 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.....	33
2.5 Pengertian Kepemimpinan	34
2.5.1 Tipe-tipe Kepemimpinan.....	40
2.6 Masyarakat	44
2.6.1 Ciri-ciri Masyarakat Desa.....	44
2.7 Penelitian Terdahulu	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Pandangan Islam terhadap Badan Permusyawaratan	
Desa	49
2.9 Definisi Operasional.....	53
2.10 Konsep Operasional	53
2.11 Kerangka Berfikir.....	54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian	55
3.2 Jenis Dan Sumber Data	55
3.3 Teknik Pengumpulan Data	56
3.4 Informan Penelitian	56
3.5 Analisis Data	57

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Kampar.....	58
4.2 Geografis Kabupaten Kampar	59
4.2.1 Keadaan Alam	59
4.3 Sejarah Kecamatan Koto Kampar Hulu	60
4.4 Sejarah Desa Tanjung dan Letak Geografis.....	61
4.4.1 Keadaan Demografis	63
4.4.2 Pemerintahan Desa	66

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan	
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung	
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	69
5.1.1 Menetapkan Peraturan Desa.....	69
5.1.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi	
Masyarakat	77
5.1.3 Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.....	83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Kendala yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	88
5.2.1 Kendala Internal yang terdapat di BPD di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu	89
5.2.2 Kendala Eksternal yang berasal dari luar BPD di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	90
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	93
6.2 Saran	94

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Fungsi BPD	2
Tabel 1.2	Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2013-2019	4
Tabel 1.3	Tingkat Kehadiran Anggota BPD dalam Kegiatan Musyawarah Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	5
Tabel 1.4	Daftar Perumusan RPJMDes oleh BPD Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	6
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	7
Tabel 3.1	Data Key Informan Penelitian	57
Tabel 4.1	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	63
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk berdasarkan suku.	63
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian	64
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk berdasarkan agama	64
Tabel 4.5	Jenis dan Potensi dan Luas lahan Produksi Tanah Pertanian	64
Tabel 4.6	Jumlah Sarana Rumah Ibadah	65
Tabel 4.7	Jumlah Objek Wisata	65
Tabel 4.8	Jumlah Organisasi Keagamaan	65
Tabel 4.9	Jumlah Sarana Pendidikan	65
Tabel 4.10	Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	66
Tabel 4.11	Daftar Nama Pemerintahan Desa	66
Tabel 4.12	Daftar Nama Kepala Dusun	66
Tabel 4.13	Daftar Nama anggota BPD	67
Tabel 4.14	Daftar Nama anggota LPM	67
Tabel 4.15	Daftar Nama Pemangku Adat	68
Tabel 4.16	Daftar Nama Pimpinan Syara'	68
Tabel 5.1	Daftar Kehadiran Rapat dalam membahas Semenisasi di dusun IV	74
Tabel 5.2	Jadwal dan Kegiatan Rapat BPD dan Kepala Desa Tanjung	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
Sat Isyanc Inceit of Surang Syarif Kasim Riau



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila sebagai dasar negara. Sistem demokrasi sendiri adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaan pengelolaan suatu negara kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan/atau semua kebijakan serta peraturan yang dibuat harus berasal dari rakyat. Oleh karna itu, aspirasi masyarakat yang berupa ide serta gagasan dari masyarakat harus menjadi landasan bagi pemerintah, baik dalam hal pembangunan ataupun kebijakan. Aspirasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang –Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas -tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah desa, potensi dan keanekaragaman desa, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh sebab itu pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa juga bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa. Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No. 06 Tahun 2014 yang terdapat pada pasal 55 adalah BPD mempunyai fungsi :

Tabel 1.1 Fungsi BPD

No	Fungsi BPD	Pelaksanaan Fungsi BPD
1	Merancang peraturan desa bersama kepala desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPD bersama kepala desa membuat rancangan peraturan desa, merumuskan peraturan desa, menetapkan apa saja kategori yang dapat dijadikan sebuah peraturan desa, yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa yang baru. 2. BPD bersama kepala desa merancang, membahas kemudian menyepakati RAPBDes yang dibuat oleh kepala desa.
2	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPD melihat dan mencari apa saja yang menjadi keluhan dan masukan dari masyarakat desa. 2. BPD mengelola dan menyalurkan apa yang menjadi aspirasi dan masukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No	Fungsi BPD	Pelaksanaan Fungsi BPD
		dari masyarakat tersebut yang berguna untuk mencapai tujuan desa yang lebih baik
3	Melakukan pengawasan kinerja kepala desa	1. BPD melakukan pengawasan terhadap peraturan desa ,keputusan desa,keputusan kepala desa dan mengawasi jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa agar tetap terkontrol.

Sumber: Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Dapat dilihat dari tabel diatas disebutkan tujuanPengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya di era otonomi daerah, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkanAspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Hal yang sangat penting dan menarik dalam struktur pemerintahan desa adalah hadirnya Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi unsur pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis, dapat mengupayakan peningkatan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari tokoh agama, adat, organisasi, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk

melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permasyarakatan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Tabel 1.2 Struktur Organisasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Tahun 2013-2019

No	Nama Anggota	Perwakilan
1	Mukhtar Lubis	Ketua/Tokoh Masyarakat
2	Iyon Supri Dt. Naro	Wakil Ketua/Tokoh Adat
3	Aduskiman	Sekretaris/Tokoh Pemuda
4	Ajis. S	Tokoh Agama
5	Nurbaiti. N	Tokoh Wanita
6	Syahrial	Dusun I
7	Muharlis	Dusun II
8	Alisman	Dusun III
9	Kasmi	Dusun IV
10	M. Nasir	Dusun V
11	Erwan	Dusun VI
12	Harun Dt. Paduko Besar	Ninik Mamak
13	Desto Antoni Dt. Mangkuto	Ninik Mamak
14	Katon, S. Hi	Ninik Mamak
15	Anar Dt. Majo Besar	Ninik Mamak
16	Basir Dt. Jalelo	Ninik Mamak

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dapat dilihat dari tabel diatas anggota BPD desa Tanjung berjumlah 16 orang yang mana pemilihan BPD pada saat itu dilakukan dengan ditunjuk langsung oleh pemerintahan desa. Namun, anggota BPD yang berasal dari ninik mamak tidak mendapatkan Surat keputusan (SK) bupati yaitu berjumlah 5 orang dikarenakan anggota BPD dari ninik mamak merupakan kebijakan dari desa yang bertujuan untuk kearifan lokal desa tersebut.

Namun setelah dikeluarkan Permendagri Pasal 5 No.110 tahun 2016 maka setiap desa hanya boleh memiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit berjumlah 5 orang dan berjumlah 9 orang paling banyak. Berdasarkan Permendagri No.110 tahun 2016 anggota BPD tidak boleh berjumlah lebih dari 9 orang seperti masa jabatan dari tahun 2013-2019 yang beranggotakan 16 orang.

Tabel 1.3 Tingkat Kehadiran Anggota BPD dalam Kegiatan Musyawarah Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

NO	Jumlah Anggota BPD	Tanggal Rapat	Jumlah yang hadir	Jumlah yang tidak hadir
1	16	07-09-2017	13	3
2	16	21-02-2018	7	8
3	16	13-05-2018	10	6
4	16	30-11-2018	14	2
5	16	29-03-2019	8	8
6	16	21-10-2019	10	6

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Dapat dilihat dari tabel diatas dalam musyawarah desa yang dilaksanakan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar banyak anggota BPD yang tidak hadir dalam mengikuti musyawarah desa tersebut, telah jelas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mampu menjalankan fungsinya karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya sebagai perwakilan dari masyarakat. BPD sebagai fasilitator dituntut untuk lebih aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti, mengadakan rapat baik itu rapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

formal maupun rapat koordinasi masyarakat dan pemerintahan desa, pemerintahan desa dengan BPD supaya berjalannya demokrasi desa.

Tabel 1.4 Daftar Perumusan RPJMDes oleh BPD Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

No	Daftar permasalahan dan keluhan masyarakat	Perumusan RPJMDes oleh BPD	
		Belum	Sudah
1	Semenisasi jalan	✓	-
2	Drainase	✓	-
3	Sarana prasarana olahraga	✓	-
4	Pemberdayaan masyarakat	-	✓
5	Pengecatan balai adat	✓	-
6	Penerangan jalan	✓	-

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Dapat dilihat dari tabel diatas ada beberapa daftar permasalahan dan keluhan masyarakat yang terjadi di desa tanjung, namun pada kenyataanya masih banyak dari perumusan RPJMDes oleh BPD yang belum terealisasi. Dan dalam pembuatan peraturan desa anggota BPD masa jabatan 2013 sampai 2019 telah membuat peraturan desa sebanyak 7 yaitu:

- Peraturan desa laporan realisasi APBDes
- Peraturan desa RKPDes
- Peraturan APBDes
- Peraturan kewenangan dan hak usul desa
- Peraturan desa penataan BUMDes
- Peraturan desa SOTK (Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Peraturan desa PAD (Pendapatan Asli Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah/volume	Ket
1	Kantor desa	1 Unit	Baik
2	Poskesdes	1 Unit	Baik
3	Gedung SDN	3 Unit	Sebagian kurang baik
4	Gedung SLTP	1 Unit	Baik
5	Gedung SMA	1 Unit	Kurang baik
6	Gedung Paud	1 Unit	Kurang baik
7	Masjid	2 Unit	1 unit masjid masih dalam pengerjaan dan bermasalah
8	Musholla	14 Unit	Sebagian kurang baik
9	Jalan lingkungan		Rusak
10	Jalan keperkebunan		Rusak
11	Balai adat	1 Unit	Baik
12	Aula serbaguna	1 Unit	Kurang baik

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Dapat dilihat dari tabel diatas sarana dan prasarana yang ada di Desa Tanjung masih banyak yang belum baik. Dalam hal ini fungsi pengawasan dianggap penting dan memperbaiki setiap masalah yang terjadi, pengawasan disini perlu mendapatkan respon positif agar permasalahan yang ada dapat segera diindaklanjuti dengan maksud dapat memperbaiki kinerja desa dalam mencapai tujuan. Disinilah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pengawasan dimaksud untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan fenomenadi atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja atau fungsi BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi yang hanya digunakan sebagai alat



pembenaran oleh pemerintah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul: ***“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
2. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep implementasi kebijakan dan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam upaya melaksanakan fungsi yang optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai Latarbelakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian terdiri dari Pengertian Desa, Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pandangan Menurut Islam Tentang BPD, Kerangka Berfikir, dan Konsep Operasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang dilakukan, yang berisikan Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Informan Penelitian, Analisis Data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini peneliti menyajikan tentang lokasi penelitian, dan mencoba menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian, seperti Sejarah Singkat Desa Tanjung, Geografis Desa Tanjung, Penduduk, Pemerintahan, Pendidikan, Agama, Mata pencaharian dan Budaya.

BAB V HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan Winarno (2007: 16). Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Agustino Leo (2006) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”.

Dye dalam Harbani Pasolong (2007:39) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan maksudnya adalah bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Ditambahkan oleh Friedrich dalam Agustino leo (2006:16) kebijakan publik sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencapai beberapa maksud dan tujuan, meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, akan tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai bagian yang terpenting dalam pemerintah tersebut.

Definisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik Harbani Pasolong (2007:39).

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktik implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi sebagai kepentingan Agustino leo (2016:126).

Menurut Grindle dalam Agustinoleo (2016:129), mengatakan keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur ataupun dilihat dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo dalam Pasolong (2016:57), mengatakan implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek sejalan dengan yang diungkapkan Hinggis dalam dalam Pasolong



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(2016:57), Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sarana strategi artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mesti ada instrumen baik SDM, SDA, dan lainnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.

Gordon dalam Pasolong (2016:57), memberikan definisi bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Seiring dengan definisi di atas, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2014:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakantindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Sementara itu, Jones dalam Widodo (2017:191-192) merumuskan batasan implementasi sebagai suatu proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Ia juga menambahkan bahwa dalam implementasi tersebut, tidak kurang dari suatu tahap dari suatu kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan. Kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Dengan demikian, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu-individu atau kelompok swasta dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada (dana, SDM, kemampuan organisasional) setelah suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program ditetapkan, dimana tindakan ini diarahkan untuk mencapai hasil-hasil atau tujuantujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai.

Menurut teori George C. Edward III dalam Agustino (2006:149) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi (*communication*).

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III dalam Agustino Leo(2006:150) yaitu komunikasi. Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi. kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut diatas, yaitu:

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksana kebijakan haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber daya

Faktor kedua yang memepengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, merupakan George C. Edward III dalam Agustino (2006:151) dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

- a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh akrena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak komponen dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sata tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakn atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu *pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apabila orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang it nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi sehingga dapat menggalkan proses implementasi kebijakan.
- d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Disposisi

Faktor *ketiga* yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik bagi Geoerge C. Edward III dalam Agustino (2006:152) adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai melaksanakan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal yang perlu dicermati pada variable disposisi adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4) Stuktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III dalam Agustino, (2008:153) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya- sumber daya menjadi menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur biroktasi/ organisasi kearah yang lebih baik, adalah:

- a. *Standar Operating Prosedure* (SOP), suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Melaksanakan fragmentasi, upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, semakin jelas bahwa variable komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, apabila ingin pelaksanaan kebijakan publik bisa berhasil, ke empat variabel tersebut perlu dilakukan dan disediakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi.

2.3 Pengertian Desa

Didalam undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pada pasal 2 ayat 2 undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Menurut orang awam, desa merupakan suatu tempat atau wilayah yang didiami oleh sekelompok penduduk yang umumnya tercirikan antara lain: mata pencaharian bertumpu pada sektor pertanian, tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum yang relatif terbatas dan sering dipahami sebagai suatu kondisi yang bertolak belakang dengan wilayah kota atau suasana perkotaan, terutama dari aspek peradabannya. Para ahli/pakar mendefinisikan desa sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Widjaja (2003:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:1) Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya didalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.. Desa merupakan suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhan menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri.

Menurut Almasri, Muammar (2018:204) Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik desa dapat dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat yang hidup dan menyelenggarakan tata kehidupan desanya berdasarkan kaidah, norma dan aturan hukum yang telah disepakati bersama, dan memiliki kuasa (wewenang) untuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya dalam bingkai pemerintahan yang mandiri. Desa mengandung makna sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesatuan hukum dimana bertempat suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan itu sendiri.

Sedangkan dipandang dari sudut ketatanegaraan atau pemerintahan, desa dipahami sebagai bagian dari organisasi kekuasaan negara atau pemerintahan atau sub sistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Praktikno dalam Juliantoro (2000:132) bahwa: "desa sering diindentikan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi pemerintah atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara".

Jadi dapat disimpulkan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa, atau yang disebut dengan nama lainnya, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/kota. Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah, dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman.

Kepala desa dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi semua kewajiban dan larangan. Pedoman tersebut biasanya diatur dalam Peraturan Daerah, yang mana kepala desa harus bisa mengabdikan dan melayani masyarakat, seluruh kepentingan pribadi tidak boleh diikuti serta dalam menjalankan tugasnya.

2.3.1 Kewenangan Desa

Pada pasal 18-19 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur lebih lanjut dalam Permendesa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2.3.2 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

Sedangkan mengenai Musyawarah desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah desa diatur pada pasal 54 UU No.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 dan pengaturan selanjutnya diatur melalui Permedesa No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

Pasal 67 (1) Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

Pasal 67 (2) Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Pasal 68 (1) masyarakat desa berhak:

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dan Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Memperoleh pelayanan yang sama adil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

d. Memilih, dipilih, atau ditetapkan menjadi:

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
4. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 68 (1) masyarakat desa berkewajiban:

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan ke gotong royongan di desa
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa

2.3.4 Peraturan Desa

Pada pasal 69 UU No.6 Tahun 2014 disebutkan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi berkelanjutan oleh masyarakat desa setempat mengingat peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Widjaja (2003:96) materi yang tertuang dalam Peraturan Desa antara lain:

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur
- b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa
- c. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa

Materi peraturan desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang perlu pengaturannya. Semua materi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Widjaja (1993:3) Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaksanaan pemerintah desa tidak dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri, pemerintah desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan pemerintahan. Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintahan desa adalah sejajar, sehingga antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa tidak bisa saling menjatuhkan. Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki jumlah ganjil paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang sesuai kebutuhan dan jumlah penduduk di desa tersebut. Pengurus BPD berasal dari warga negara Indonesia dan dari masyarakat setempat yang memiliki syarat untuk bisa menjadi pengurus BPD. Penetapan anggota BPD dilakukan dengan cara demokrasi yang dipilih oleh masyarakat desa.

Menurut Dedy Supriady (2001:35) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Fungsi BPD menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kinerja maupun peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dan menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Peran Badan Permusyawaratan desa dalam proses penyusunan peraturan desa dilakukan melalui musyawarah mufakat. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, tahap penyusunan peraturan desa yaitu diawali pembuatan rancangan peraturan desa. Penyusunan rancangan harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Disinilah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menggali dan menghimpun aspirasi masyarakat harus dilakukan secara mendalam. Setelah rancangan selesai selanjutnya dibahas dalam permusyawaratan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LKMD, dan pihak yang terkait. Setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembahasan dan menentukan kesepakatan maka peraturan desa bisa ditetapkan. Penetapan dilakukan oleh Kepala Desa dan disetujui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Babak baru Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasca lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan ditetapkannya Undang-undang tentang desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan, jika sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa maka sekarang menjadi Lembaga Desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis, kini fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan APBDES, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa atau MUSDES dengan peserta terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Kelompok-kelompok dan Tokoh Masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwasannya agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Yang mana Badan Permusyawaratan Desa ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa, BPD perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini.

Menurut Joseph Riwu (2010:120) salahsatu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dapat disimpulkan menjadi empat jenjang:

a) Partisipasi dalam proses pembuat keputusan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b) Partisipasi dalam pelaksanaan
- c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- d) Partisipasi dalam evaluasi

2.4.1 Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Tugas dan fungsi BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa:

1. Kedudukan BPD
 - a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 - b. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.
2. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datang dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Peran BPD dan Pemerintah Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.

3. Wewenang BPD

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan
- i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Hanif Nurcholis (2011:78) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak:

- 1) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- 2) Menyatakan pendapat
- 3) Mengajukan rancangan peraturan desa
- 4) Mengajukan pertanyaan
- 5) Menyampaikan asal-usul pendapat
- 6) Memilih dan dipilih
- 7) Memperoleh tunjangan

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:

- a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e) Memproses pemilihan Kepala Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya untuk berfikir dan bertindak sehingga melalui perilaku positif yang ia berikan memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan organisasi (Siagian, 1985:24).

Sugiyarta SL (2009:87) dalam bukunya “Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan” menyebutkan bahwa “kepemimpinan dan pemimpin merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktural maupun fungsional”.

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan/kecerdasan yang mendorong sejumlah orang agar dapat bekerja sama dengan mengarahkan dan membimbing perasaan orang, pikiran, dan tingkah laku orang lain untuk melaksanakan segala kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama dengan kreatifitas dan inisiatif orang tersebut (Nawawi dan Martini, 1993:3).

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengarahkan sekelompok orang agar bertindak dan melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu, kewenangan yang digunakan untuk memimpin suatu kelompok masyarakat tertentu diperoleh berdasarkan suatu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya melalui suatu pengangkatan secara resmi ataupun tidak resmi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nawawi dan Martini (1993:15) mengemukakan unsur-unsur dalam kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya seorang yang berfungsi memimpin, yang disebut pemimpin (*leader*).
- b) Adanya orang lain yang dipimpin.
- c) Ada kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya.
- d) Adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara sistematis maupun bersifat seketika.
- e) Berlangsung berupa proses di dalam kelompok/organisasi, baik besar dengan banyak maupun kecil dengan sedikit orang-orang yang dipimpin.

Kartini Kartono (2010:36) dalam bukunya “Pemimpin dan Kepemimpinan” menyebutkan prasyarat kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting yaitu:

1. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.
2. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu “*mbawani*” atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
3. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari keanggotaan biasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepemimpinan dapat menggerakkan seseorang atau sejumlah orang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Seorang pemimpin dapat mempengaruhi orang yang dipimpinnya untuk taat, patuh terhadap apa yang dia perintahkan kepada sekelompok orang yang berada dibawah pimpinannya. Dengan kekuatan, kewibawaan, dan kemampuan yang dimilikinya sehingga mampu untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Penyelenggaraan kepemimpinan yang dilakukan secara efektif, akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan suatu kelompok/organisasi, dimana pemimpin tersebut berada. Dengan memperhatikan situasi sosial kelompoknya, kepemimpinan akan berjalan sesuai dengan fungsinya dimana seorang pemimpin dapat mempertanggung-jawabkan suatu keputusan yang diambil dan bersama-sama melaksanakannya.

Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari (1993:74) dalam bukunya “Kepemimpinan yang Efektif” mengemukakan bahwa ada dua dimensi fungsi kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (*direction*) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan-tanggapan orang-orang yang dipimpinnya.
2. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (*support*) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pokok kelompok/organisasi, serta diinfestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan pemimpin.

Dengan mengacu pada kedua dimensi diatas, Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari juga mengemukakan 5 fungsi kepemimpinan sebagai berikut:

1. Fungsi Instruktif

Fungsi Instruktif merupakan fungsi yang bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin sedangkan fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Dalam fungsi instruktif, keputusan yang ditetapkan pemimpin tidak akan ada artinya tanpa kemampuan mewujudkan atau menterjemahkannya menjadi instruksi/perintah, dan perintah itu tidak akan ada artinya jika tidak dilaksanakan. Artinya, dengan kemampuan seorang pemimpin dapat menggerakkan orang agar melaksanakan perintah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Konsultatif

Fungsi konsultatif ini bersifat komunikasi dua arah, yaitu dengan adanya konsultasi dengan pemimpin setelah atau sebelum keputusan ditetapkan. Konsultasi dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok dengan jumlah anggota yang terbatas. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan itu berlangsung efektif. Dalam fungsi konsultasi ini seorang pemimpin diharuskan menjadi pendengar yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Fungsi Partisipasi

Fungsi partisipasi ini tidak hanya sekedar berlangsung dan bersifat dua arah, tetapi berwujud dalam pelaksanaan hubungan manusia yang efektif, antara pemimpin dengan sesama orang yang dipimpin, dalam fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya baik dalam keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Pemimpin tidak hanya mampu membuat keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya, tetapi juga ikut dalam proses pelaksanaannya. Keikutsertaan pemimpin tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.

4. Fungsi Delegasi

Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemimpin. Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah-milah tugas pokok organisasinya dan mengevaluasi yang dapat atau tidak dapat dilimpahkan pada orang-orang yang dipercayainya. Pendelegasian harus diberikan pada orang-orang kepercayaan. Pendelegasian ini dilakukan oleh pemimpin karena dalam menjalankan tugasnya tidak mungkin dilakukan sendiri. Pemimpin seorang diri tidak akan dapat berbuat banyak dan bahkan mungkin tidak ada artinya sama sekali.

5. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan pencapaian tujuan bersama secara maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah (Nawawi dan M. Martini, 1993:74-81).

Fungsi kepemimpinan akan terwujud melalui aktivitas-aktivitas kepemimpinan. Dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kepemimpinan tersebut akan terlihat gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dengan pola masing-masing. Tiga pola dasar gaya kepemimpinan itu adalah sebagai berikut:

a. Mementingkan Pelaksanaan Tugas

Gaya kepemimpinan ini pemimpin menaruh perhatian yang besar dan memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa campur tangan orang lain. Pemimpin berasumsi bahwa dengan apabila setiap anggota melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien, pasti akan dicapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan bersama.

b. Mementingkan Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama

Pemimpin menaruh perhatian yang besar dan keinginan yang kuat agar setiap orang mampu menjalin kerja sama. Setiap orang harus mampu menjalin kerja sama dengan pemimpin. Pemimpin berkeyakinan bahwa dengan kerja sama yang intensif, efektif dan efisien agar semua tugas dapat dilaksanakan secara maksimal.

c. Mementingkan Hasil yang Dapat Dicapai

Pemimpin menaruh perhatian yang besar dan memiliki keinginan yang kuat, agar setiap anggota berprestasi sebesar-besarnya. Pemimpin memandang



produk (hasil) yang dicapai merupakan ukuran prestasi kepemimpinannya (Nawawi dan M. Martini, 1993:84-85).

2.5.1 Tipe-tipe Kepemimpinan

Interaksi antara pemimpin dan situasi lingkungannya membentuk tipe kepemimpinan tertentu. Sedangkan proses interaksi antar individu dengan lingkungan sekitarnya memunculkan dinamika serta hukum-hukumnya tersendiri, yang menjadi sistem interaksi dalam membentuk tokoh pemimpin dan kepemimpinan (Kartono, 2010:61). Aneka macam jenis kepemimpinan dalam kehidupan nyata menurut Kartini Kartono (2010:9) dalam bukunya “Pemimpin dan Kepemimpinan” antara lain:

- a. Kepemimpinan formal dan informal.
- b. Kepemimpinan di bidang keagamaan, pendidikan, politik, ketentaraan, bisnis, teknik, pemerintahan, dan lain-lain. Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi/lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku jabatan dalam struktur organisasi. Ciri-ciri pemimpin formal antara lain:
 - Berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tertentu, atas dasar legitimasi formal oleh penunjukan pihak yang berwenang (ada legitimasi).
 - Sebelum pengangkatan, ia harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu.
 - Adanya dukungan dari organisasi formal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mendapatkan balas jasa materiil dan immaterial tertentu serta *emolument* (keuntungan ekstra, penghasilan sampingan dan lainnya).
- Bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasikan.
- Apabila melakukan kesalahan, dia akan dikenakan sanksi dan hukuman.
- Selama masa kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan wewenang, antara lain untuk: menentukan *policy*, menggariskan pedoman dan petunjuk, mengalokasikan jabatan penempatan bawahannya, melakukan komunikasi, mengadakan *supervise* dan *control*, menetapkan sasaran organisasi dan mengambil keputusan-keputusan penting lainnya (Kartono, 2010:9-10).

Pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Ciri-ciri pemimpin informal antara lain adalah:

- 1) Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin.
- 2) Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dia tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.
- 4) Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela.
- 5) Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi prasyarat formal tertentu.
- 6) Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh massanya (Kartono, 2010:11).

Peranan sosial pemimpin informal terlihat dalam memberikan pengaruh berupa sugesti, larangan, atau berbuat sesuatu (Kartono, 2010:11). Dalam masyarakat pedesaan, kepemimpinan merupakan sesuatu yang melekat sebagaimana unsur masyarakat lainnya. Kepemimpinan sendiri ada yang lahir karena sebuah proses sosial alami, juga oleh sebuah penunjukan atau pelimpahan, yang disebut dengan kepemimpinan formal dan informal (Yulianti dan Pornomo, 2003:226).

Kepemimpinan formal, biasanya dilandasi oleh ketetapan resmi dengan batasan yang jelas. Kepemimpinan resmi di pedesaan ini biasanya direpresentasikan oleh kepala desa dan pamongnya serta pejabat resmi lainnya, sementara yang tidak resmi adalah tokoh masyarakat yang juga memiliki pengaruh. Seringkali kepemimpinan informal lebih besar daripada pemimpin resmi, demikian pula kepemimpinan informal kerap kali mampu melampaui batas tertentu dan merasuk pada seluruh sendi kehidupan masyarakat (Yulianti dan Pornomo, 2003:226).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada kenyataannya, masyarakat pedesaan yang sangat dominan mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah kepemimpinan informalnya. Apalagi di pedesaan pedalaman, kesukuan, kepemimpinan informal memegang peranan penting (Yulianti dan Poernomo, 2003:230). Wewenang formal lahir karena sengaja dibuat berdasarkan keputusan dan biasanya bersurat kuasa, memiliki waktu berjalan yang pasti, diangkat oleh sesuatu yang lebih tinggi di atasnya serta jelas tanggung jawab dan wewenangnya karena didasari adanya surat kuasa. Kepala desa dan pegawai pemerintah lainnya merupakan wujud dari wewenang formal tersebut. Tokoh masyarakat, kepala suku, merupakan pemimpin informal yang mempunyai wewenang juga di pedesaan bahkan seringkali lebih mendominasi.

Sebagai wewenang formal maka, seringkali pemerintah desa hanya dapat menggerakkan masyarakat pada aspek pembangunan fisik saja, beberapa kekuasaan mengenai tata nilai dan norma perilaku seringkali masih dikendalikan oleh kekuasaan informal dalam hal ini tokoh masyarakat dan agama. Dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa pemerintahan daerah yang dibuat untuk mengatur pemerintahan desa dan kelurahan harus menghargai asal-usul desa, menghormati adat istiadatnya, serta mengembangkan kelembagaan tradisional yang ada (Yulianti dan Poernomo, 2003:231).

Wewenang informal adalah wewenang yang dimiliki tokoh masyarakat, para kyai, pastur, serta orang yang dituakan di desa. Wewenang informal diperoleh dari proses alami yang rumit, prosesnya melibatkan penilaian dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh masyarakat sehingga secara sosial apabila masyarakat cukup maka ia akan memiliki wewenang informal, wewenang informal ini selalu dan searah dengan perkembangan norma yang ada dalam masyarakat (Yulianti dan Poernomo, 2003:231).

2.6 Masyarakat

Menurut Selo Sumardjan (2004:32) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Konsep masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi erat hubungannya dengan lingkungan. Hal berikut berarti bahwa ketika seseorang berinteraksi denganseksamanya, maka lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi sikap-sikap,perasaan, perlakuan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungannya.Misalnya : lingkungan keluarga, para remaja yang sebaya, lingkungan kerja dankampus. Di masing-masing lingkungan itulah ia akan termasuk sebagai anggota kelompoknya. Oleh karena itu, ia dapat menyertakan, memainkan sifat dankehendak anggota kelompoknya bahkan kadang-kadang menciptakan, meminjam,meniru dan memperkenalkan perilaku yang berbeda dalam masyarakat.

2.6.1 Ciri-Ciri Masyarakat Desa (karakteristik)

Dalam buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga, seorang ahli sosiologi “Talcott Parson” menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*) yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) *Afektifitas* ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta,kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatantolong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.

- 2) *Orientasi Kolektif* sifat ini merupakan konsekuensi dari Afktifitas. Yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan.
- 3) *Partikularisme* pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subyektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja. (lawannya Universalisme)
- 4) *Askripsi* yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang merupakan kebiasaan atau keturunan. (lawannya prestasi)
- 5) *Kekabaran (diffuseness)*. Sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung, untuk menunjukkan sesuatu. Dari uraian tersebut (pendapat Talcott Parson) dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh

2.7 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Siti Asiyah (JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, Tahun 2013) yang berjudul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa TriManunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari fungsi badan permusyawaratan desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sejalan dengan tujuan penelitian diatas maka populasi penelitian ini adalah anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat. sedangkan teknik pengambilan sampel untuk anggota BPD Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun menggunakan teknik sensus karena jumlahnya yang sedikit, sedangkan untuk Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Data yang digunakan yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung dari narasumber dan informan melalui kuesioner dan wawancara. Kemudian data sekunder yakni data yang sudah diolah sebelumnya tentang arsip-arsip rapat desa dan sudah dipublikasikan tentang demografi desa. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi badan permusyawaratan desa di desa Tri manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berada pada kategori tidak baik dengan persentase 57,38% meliputi fungsi legislasi dengan persentase 54,70%, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan persentase 62,65%. Sesuai dari hasil penelitian ini, maka Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan lagi kinerjanya dalam menjalankan fungsinya di pemerintahan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian Anggi Utami (JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, Tahun 2013) yang berjudul “Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tualang belum optimal”. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Angket / Quisioner. dianalisa secara *Deskriptif Kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik, yang meliputi fungsi meliputi peraturan desa sebanyak 61 orang atau 50,86% dan fungsi menampung aspirasi masyarakat sebanyak 70 orang atau 59,82%. Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat terlihat bahwa fungsi Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan berbagai faktor yang meliputi, Sarana dan prasarana yang belum memadai serta Kurangnya komunikasi dan partisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
3. Penelitian Jukriadi (JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SYARIF KASIM RIAU, Tahun 2014) yang berjudul “Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan apa faktor-faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan kerjanya. Kemudian jenis penelitian ini ialah penelitian sosiologis dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Sawah, Dari enam kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa yang terlaksana hanya dua kewenangan saja yaitu mengusulkan dan pengangkatan kepala desa dan membentuk panitia pemilihan kepala desa sementara empat kewenangan lainnya belum terlaksana, yaitu Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan Menyusun tata tertib BPD. Kemudian adapun faktor yang menjadi hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan kerjanya terdiri dari Profesi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Faktor usia,



Faktor Sarana dan Prasarana, Kurangnya Pemahaman Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Faktor Sumber Daya Manusia (SDM).

2.8 Pandangan Islam terhadap Badan Permusyawaratan Desa

Islam adalah agama universal yang meliputi seluruh kehidupan manusia, baik urusan dunia maupun akhirat, baik jasmani maupun rohani. Undang – undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori nomokrasi islam.

Menurut Pulungan Suyuti (2002:152) Dalam nomokrasi islam terdapat tujuh prinsip yang harus di pegang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara ketujuh pinsip tersebut terdapat prinsip “pengambilan keputusan”. Al -quran hanya merekomendasikan musyawarah sebagai metode dalam pengambilan keputusan. Hal ini tertuang dalam surat Asy-Syura (42) ayat 38. Dimana Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan musyawrah dalam segala urusan, selama urusan tersebut bukan merupakan urusan ibadah yang telah diatur dalam Al-quran dan As-Sunnah. Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk menerapkan bagaimana cara yang menurutnya tepat dalam melakukan musyawarah.

Dari hasil menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai cara dalam pengambilan keputusan. Dimana prinsip-prinsip tersebut yaitu ta'aruf (saling mengenal), ta'awun (kerja sama), maslahah (keuntungan), adl (bersikap adil), tahgyir (perubahan), selain prinsip-prinsip di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



atas hasil keputusan dari sebuah musyawarah juga harus memperhatikan tiga hal pokok, yaitu:

1. Tingkat akurasi (ketepatan)
2. Tingkat kemanfaatan, dan
3. Tingkat penalaran

Dari keberhasilan tersebut sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari kinerja Kepala Desa dan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung tersebut, baik dalam hal pembangunan maupun dalam tugasnya sebagai salah satu roda penggerak Pemerintahan Desa yang berjalan sejajar. Q.S.

Ali Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Menurut Ibnu Tamiyah (1960:85)dalam skripsi Nurmansyah (2017:30)

Secara istilah Syura berasal dari kata syawwara-yusyawwiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu, bentuk lain dari kata kerja ini adalah asyara (memberi isyarat), tasyawara (berunding saling tukar pendapat), Syawir (minta pendapat) musyawarah dan mustasyir (minta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat orang lain). Jadi Syura adalah menjelaskan, menyatakan atau mengajukan pendapat yang baik, di sertai dengan menanggapi dengan baik pula pendapat tersebut.

Pengertian ini terdapat pada tiga tempat dalam al-quran yakni dalam surah al-baqarah (2) ayat 233, dalam surah asy-syura (26) ayat 38, ayat ini mengandung pujian atas orang yang menerima seruan Allah SWT yang dibawa nabi Muhammad SAW, mendirikan sholat dengan baik, bermusyawarahkan segala urusan mereka, dan menafkahkan segala sebagian rezki yang mereka peroleh. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya dan akan memperoleh nikmat dari sisi Allah SWT, karena hal itu bernilai ibadah. Ketiga yaitu surah al-imran (3) ayat 159, ayat ini merupakan perintah bagi nabi SAW, untuk melaksanakan musyawarah, bermusyawarah merupakan ungkapan hati yang lemah lembut dan sifat terpuji orang yang melaksanakannya.

Ada beberapa hadist-hadist tentang pentingnya bermusyawarah (Hidup Demokratis):

b. Hadist pertama diriwayatkan Imam Ibnu Majah:

إِذَا اسْتَشَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسِّرْ عَلَيْهِ (ابن ماجه)

Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah". (HR. Ibnu Majah)

c. Hadist kedua diriwayatkan Imam Thabari:

(الطبرانی)تشاوروا الفقهاء والعابدين ولا تجعلونه برأي خاصة

Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli (fikh) dan ahli ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja" (HR. Ath-Thabrani)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Hadist ketiga diriwayatkan Imam Ahmad:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرُ: لَوِ اجْتَمَعْنَا فِي مَشُورَةٍ .
مَا اخْتَلَفْتُمَا (ر. أحمد)

Telah bersabda Rasulullah SAW. Kepada Abu Bakar dan Umar : “Apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua.” (HR. Ahmad)

e. Hadist keempat yang diriwayatkan Imam Tarmizi:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِصَاحِبِهِمْ رَسُولًا لِلْهَيْئَةِ لِيُحْلِلُوا لِي

“Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya dibanding Rasulullah SAW.” (HR. Tirmidzi)

Dapat dilihat dari empat hadist, jelas bahwa apabila telah ada seorang saudaramu untuk bermusyawarah maka patuhilah (HR.Ibnu Majah) karena dengan bermusyawarah bisa membulatkan dan mengambil keputusan yang baik tidak hanya mengandalkan pendapat sendiri saja. Bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan terdiri dari Ketua rukun, Tokoh adat, Pemuda, Tokoh masyarakat, golongan profesi dan lainnya. Hal ini sejalan dengan turunnya al-quran yang mengajarkan musyawarah dalam mengambil suatu ketetapan pada proses penyelenggaraan pemerintah. Dimana pemerintah (pemimpin) tidak boleh lepas dari musyawarah Rasulullah SAW, berkata kepada Abu bakar dan Umar. “Apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kalian berdua”.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan di antaranya adalah:

- 1) Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 2) Pelaksanaan fungsi adalah realisasi dari apa yang telah direncanakan atau yang ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa setempat, yang berfungsi :
 - a. Fungsi menetapkan perturan desa bersama Kepala Desa.
 - b. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - c. Fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala desa
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.10 Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable (Muhammad Idrus 2009:77), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisis dari variable tersebut. Dalam pengukuran ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

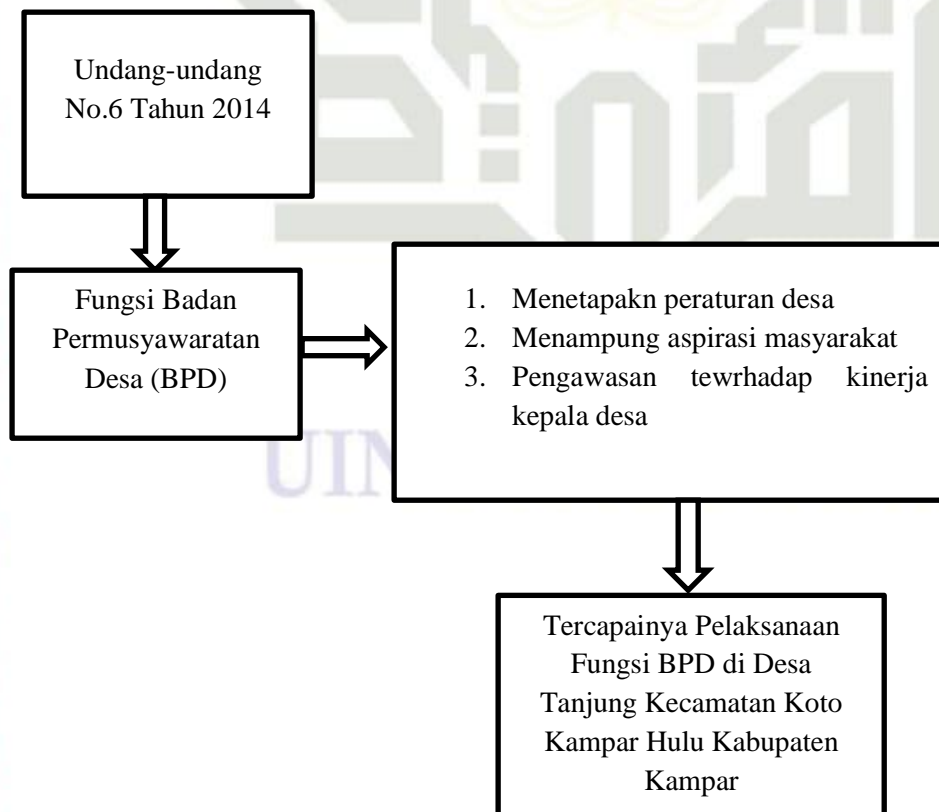
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat satu variabel yang akan diukur yaitu fungsi BPD. Adapun variabel fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan indikatornya sebagai berikut.

Variabel	Indikator	Sub indikator
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	1.Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa	1. Membuat rancangan peraturan desa 2. Merumuskan dan menetapkan peraturan desa
	2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	1.Bersosialisai dengan masyarakat 2.Mendengarkan dan menerima aspirasi-aspirasi masyarakat 3.Menyalurkan setiap aspirasi masyarakat untuk dijadikan kebijakan
	j. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala desa	1.Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa 2.Melakukan pengawasan terhadap dana desa

Sumber: Undang-undang No.6 tahun 2014

2.11 Kerangka Berfikir





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti berlokasi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Alasan mengangkat judul ini karena melihat dari sisi BPD sebagai perwakilan dari penduduk desa yang berfungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh karenanya peneliti ingin melihat sejauh mana berjalannya fungsi BPD di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Maret 2020.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari informan dan di olah sendiri oleh peneliti. Data primer di peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden atau Kepala desa dan anggota BPD.
2. Data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung yaitu dari hasil dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai pihak atau instansi terkait dengan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Dalam teknik ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi tempat penelitian, untuk melihat lebih dekat dan jelas tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yang menghasilkan data berupa data transkrip wawancara. Adapun yang akan di wawancarai menjadi key informan dalam penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan desa (BPD). Kepala desa Tanjung serta perangkat desa dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Pada teknik ini yaitu teknik dokumentasi atau berupa foto maupun berupa dokumen bias juga berupa kegiatan mencatat bukti yang dapat mendukung temuan penelitian yang penulis buat.

3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagian yang telah dijelaskan oleh (Arikunto 2006: 145) subjek penelitian adalah merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penentuan subjek penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan cara sampel yaitu *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu (Sugiyono, 2005:96). Penelitian ini mengambil sampel siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Tabel: 3.1 Data Key Informan Penelitian

No	Informan Peneliti	Jumlah
1	Kepala Desa di Desa Tanjung	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Ketua BPD	1
4	Wakil ketua BPD	1
5	Anggota BPD	4
6	Anggota BPD perwakilan wanita	1
7	Ninik mamak	2
8	Tokoh masyarakat	4
	Jumlah	15

3.5 Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data-data diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di desa tempat penelitian ini dilaksanakan kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967. Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya. Secara administrasi, Kabupaten Kampar dibagi kedalam 20 daerahkecamatan dengan jumlah penduduk ± 555.146 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk adalah 50,78 jiwa per km². Sebagian besar penduduk (67.22%) bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan hanya sebagian kecil (0.22%) yang bekerja di sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur seperti jaringan jalan raya (1.856,56 km), jaringan listrik (72,082 KWH) dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang yang memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH. Fasilitas lain yang juga telah tersedia antara lain layanan telekomunikasi (telepon kabel, telepon selular, dan jaringan internet). Jaringan air bersih dengan kapasitas produksi sebesar 1,532,284 m³, dan layanan Perbankan (Bank Nasional dan Bank Lokal).

4.2 Geografis Kabupaten Kampar

4.2.1 Keadaan Alam

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

- a. Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Kuok, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
- b. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

4.3 Sejarah Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar. Koto Kampar Hulu terdapat di hulu sungai kampar. Berikut ini adalah keterangan mengenai Kecamatan Koto Kampar Hulu yang berjarak 85km dari kota Bangkinang. Secara geografis wilayah ini terletak pada $00^{\circ}17' - 02^{\circ}04''$ LS dan $100^{\circ}00' - 100^{\circ}58.0''$ BT dengan ketinggian 461,5 meter di atas permukaan laut (dpl). Kawasan sungai kampar, memanjang dari arah utara keselatan dengan panjang 16,4 km dan lebar 7 km, dengan batas-batas sebelah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

antara Kecamatan Kapur IX (Sumbar), sebelah selatan Kecamatan Aliantan (Rohul), sebelah barat Kecamatan XIII Koto Kampar dan sebelah timur kecamatan Kabun (Rohul). Kawasan sekitar kecamatan Koto Kampar Hulu terdiri dari 6 desa.

4.4 Sejarah Desa Tanjung dan Letak geografis

Desa Tanjung termasuk Desa yang tertua di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Desa Tanjung sudah ada sebelum keberadaan Kerajaan Muara Takus, sejarah juga mengatakan Pembangunan Candi Muara Takus juga melibatkan Masyarakat Desa Tanjung, dapat disimpulkan berdirinya Desa Tanjung sebelum Abad ke 7 (Tujuh) sebelum Tahun 600 M.

Sekarang Kecamatan XIII Koto Kampar dimekarkan menjadi 2 (Dua) Kecamatan Yaitu dengan nama Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang diresmikan oleh Bupati Kampar Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM pada Hari Jum'at Tanggal 11 Juni 2010 dengan Ibu Koto Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu Desa TANJUNG.

Desa Tanjung (Kantor Kepala Desa) berjarak 2 Km dari Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan Jarak dengan Ibukota Kabupaten 60 Km. Sedangkan jarak dengan Ibukota Propinsi 120 Km.

Desa Tanjung pada awalnya bernama Ujung Tanjung yang diberi nama oleh Datuk Godang Cincin. Menurut sejarah dialah pendiri Desa Tanjung (Sebelum Abad ke 7) karena :

1. Desa Tanjung dikelilingi oleh Sungai Kampar (Daratan yang menonjol ke sungai)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Adanya sebatang Bunga Tanjung yang terletak di tengah-tengah Desa Tanjung yang diperkirakan sudah ada semenjak adanya Desa Tanjung.

Dan karena adanya evolusi oleh masyarakat sering disebut dengan nama Tanjung sehingga nama tersebut sudah melekat hingga sekarang.

Desa Tanjung memiliki luas wilayah 8 Km x 9 Km, (72.000 Ha.) sedangkan yang dijadikan areal pemukiman 1 Km x 1,5 km (1.500 Ha.)

Adapun suhu udara berkisar 21 C” sampai 34 C” dengan curah hujan 2000 Milimeter sampai 3000 Milimeter per Tahun.

Topografi Desa Tanjung datar dan bergelombang hingga berbukit dan produktifitas tanah nya termasuk tinggi sehingga banyak tanaman yang bisa tumbuh dengan subur.

Ditinjau dari batas wilayah Desa Tanjung berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pongkai dan Desa Tabing
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Bungsu dan Desa Muara Takus
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Takus dan Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabing dan Nagari Muara paiti Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)

Dalam struktur sehari-hari mengenai kewilayahan, disamping wilayah administratif Pemerintahan Desa, Desa Tanjung juga dikenal dengan Hukum Adat, yang mempunyai wilayah yang dikenal dengan Tanah Ulayat yang dikuasai oleh Ninik Mamak untuk kepentingan Cucu Kemenakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Ulayat Desa Tanjung secara umum berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Tabing dan Desa Gunung Malelo.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Muara Takus.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Muara Takus dan Kenegrian Ninik Mamak Gunung Malintang di Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)
- Sebelah Barat berbatas dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Tabing dan Ninik Mamak Kenegrian Muara Paiti Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat).

4.4.1 Keadaan Demografis

Demografis (Kedudukan Penduduk) Desa Tanjung dengan jumlah penduduk **5.359** Jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) **1.512** KK. Dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.1Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.767
2.	Perempuan	2.592
	Jumlah	5.359

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Tabel 4.2Jumlah penduduk berdasarkan suku

No	Suku	Jumlah
1.	Melayu/Penduduk Asli	5.168
2.	Minang	98
3.	Batak	31
4.	Jawa	42
5.	Lainnya	20
	Jumlah	5.359

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Syarif Kasim Riau

Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	2.755
2.	Pedagang	376
3.	Buruh/Jasa	270
4.	Pegawai Negeri Sipil	120
5.	Pegawai Swasta	87
6.	Tni/Polri	38
7.	Belum Bekerja	1.619
8.	Lainnya	94
	Jumlah	5.359

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Tabel 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	5.359
2.	Kristen Katholik/Protestan	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
	Jumlah	5.359

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Tabel 4.5 Jenis Potensi dan Luas lahan Produksi Tanah Pertanian

No	Jenis Potensi	Luas Lahan (Ha.)	Yang Produksi	Keterangan
1.	Perkebunan Karet	4.500	225	-
2.	Perkebunan Gambir	1500	1000	-
3.	Perkebunan Jeruk	150	-	-
4.	Persawahan	250	50	-
5.	Palawija	200	55	Cabe, Sayur
6.	Kolam Dan Keramba	12	6	-
7.	Hutan Produksi	2.500	-	Tebang Liar
8.	Lahan Tidur	800	250	Diusulkan
9.	Galian C (Sirtu)	350	0	-
10.	Industri Rumah Tangga	7 Unit	5	-
11.	Batubara	0	0	-
12.	Sawit	750	425	-

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.6 Jumlah Sarana Rumah Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	4
2.	Musholla	14
	Jumlah	18

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Tabel 4.7 Sarana Objek Wisata :

No	Objek Wisata	Jumlah
1.	Air Terjun Panisan	1
2.	Air Terjun Batu Hidung Sungai Kopu	1
3.	Pulau Diambai (Lokasi Perkemahan Dan Balimau Kasai)	1
4.	Pulau Petai (Hamparan Batu Dan Pasir)	1
5.	Gua Tanah Berdengung	1

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Tabel 4.8 Jumlah Organisasi Keagamaan

No	Organisasi	Jumlah
1.	Taman Pendidikan Alqur`An	13
2.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur`An (Lptq)	1
3.	Ikatan Remaja Mesjid	1
4.	Wirid Pengajian/Yasinan Kaum Ibu	11
5.	Majelis Taklim	4
6.	Wirid Zikir Dan Marhaban	3
7.	Lembaga Didikan Subuh	1
	Jumlah	34

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Tabel 4.9 Jumlah Sarana Pendidikan

No	Nama Sarana Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	Negeri
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	Negeri
3.	MTS Rahmatul Hidayah	1	Yayasan
4.	Sekolah Dasar (SD)	3	Negeri
5.	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	3	Swasta
6.	Taman Pendidikan Alqur`an (TPA)	13	Swadaya
7.	TK	1	Swasta
8.	PAUD	1	Swasta
	Jumlah	24	

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 4.10 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamatan SD	2.436
2.	Tamatan SMP Sederajat	676
3.	Tamatan SMA Sederajat	474
4.	Tamatan Perguruan Tinggi	155
5.	Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	168
6.	Belum Sekolah	1.450
	Jumlah	5.359

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

4.4.2 Pemerintahan Desa

Tabel 4.11 Daftar Nama Pemerintahan Desa

No	Nama	Jabatan
1.	Sutomi	Kepala Desa
2.	Rusli Munir	Sekretaris Desa
3.	Abdul Rahman	Kasi Pemerintahan
4.	Pitriadi	Kasi Pembangunan
5.	Fitra Hayati	Kasi Kesejahteraan
6.	Melly Dwi Saputri	Kaur Keuangan
7.	Syamsuardi	Kaur Pelayanan
8.	Sri Wahyuni	Kaur Tata Usaha Dan Umum
9.	M. Sholehan	Bendahara Desa

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Tabel 4.12 Daftar Nama Kepala Dusun

No	Nama	Jabatan
1.	Hadisman	Kepala Dusun I
2.	Edi Siswarianto	Kepala Dusun II
3.	Jamahar	Kepala Dusun III
4.	Idamra	Kepala Dusun IV
5.	Hardianto	Kepala Dusun V
6.	Zainal	Kepala Dusun VI
7.	Ario Susanto	Kepala Dusun VII

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.13 Daftar Nama Anggota BPD

No	Nama	Jabatan	Perwakilan
1.	Mukhtar Lubis	Ketua	Tokoh Masyarakat
2.	Iyon Supri Dt. Naro	Wk.Ketua	Tokoh Adat
3.	Aduskiman	Sekretaris	Tokoh Pemuda
4.	Ajis. S	Anggota	Tokoh Agama
5.	Nurbaiti. N	Anggota	Tokoh Wanita
6.	Syahrial	Anggota	Dusun I
7.	Muharlis	Anggota	Dusun II
8.	Alisman	Anggota	Dusun III
9.	Kasmi	Anggota	Dusun IV
10.	M. Nasir	Anggota	Dusun V
11.	Erwan	Anggota	Dusun VI
12.	Harun Dt. Paduko Besar	Anggota	Ninik Mamak
13.	Desto Antoni Dt.Mangkuto	Anggota	Ninik Mamak
14.	Katon, S.Hi	Anggota	Ninik Mamak
15.	Anar Dt. Majo Besar	Anggota	Ninik Mamak
16.	Basir Dt. Jalelo	Anggota	Ninik Mamak

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Tabel 4.14 Daftar Nama Anggota LPM

No	Nama	Jabatan
1	Gussandri, Sp	Ketua
2	Abdal, S.Ag	Sekretaris
3	Dahlimar	Bendahara
4	Syukri	Seksi Agama dan Adat
5	Ardinal	Seksi Pendidikan, Olah Raga
6	Masri. N	Seksi Ekonomi dan Koperasi
7	Herman Koko	Seksi Keamanan dan Hukum
8	Ambiar	Seksi Lingkungan Hidup dan sosial
9	Eli Yurni	Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Tabel 4.15Daftar Nama Pemangku Adat

No	Nama	Gelar	Suku	Keterangan
1.	Iyon Supri	Dt. Naro	Domo	Pucuk Adat
2.	Musri	Dt. Penghulu Besar	Melayu	Penguasa Ulayat
3.	Harun	Dt.Paduko Besar	Domo	Ninik 4 Suku
4.	Desto Antoni	Dt. Mangkuto	Pitopang	Ninik 4 Suku
5.	Katon, S.Hi	Dt.Sajelo	Domo	Ninik 4 Suku
6.	Anar	Dt.Majo Besar	Piliang	Ninik 4 Suku
7.	Ibun	Dt. Kuto Majo	Domo	Ninik Mamak
8.	Basir	Dt.Jalelo	Melayu	Ninik Mamak
9.	Masnur, Sh	Dt. Jo Penghulu	Pitopang	Ninik Mamak
10.	Syukri	Dt. Lakmano	Melayu	Ninik Mamak
11.	Syariyal	Dt.Jalelo	Pitopang	Ninik Mamak
12.	H.Rais	Dt. Samajo	Domo	Ninik Mamak
13.	Sunar	Dt.Sindo	Piliang	Ninik Mamak
14.	Maruncun	Dt. Kuajo	Piliang	Ninik Mamak
15.	H. Armos	Dt.Jonanti	Domo	Ninik Mamak

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

Tabel 4.16Daftar Nama Pimpinan Syara'

No	Nama	Gelar
1.	Masrianto, S.Sos	Iman (Pucuk Syara')
2.	Ajis. S	Bilal
3.	M. Alaidin, S.Pd.I	Khatib

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD sebagai Mitra Pemerintahan (legislasi) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah, sebagai Wakil masyarakat BPD harus mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan sebagai Pengawas BPD mengawasi setiap kegiatan pemerintahan dan kinerja Kepala Desa. Peran tersebut dijalankan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, dari data yang didapat berdasarkan responden anggota BPD, responden anggota LPM, dan responden masyarakat serta perangkat desa, bahwa anggota BPD Desa Tanjung belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut dapat dilihat dari penilaian masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh BPD, semua hasil wawancara yang telah dilakukan berdasarkan responden masyarakat tidak ada satupun masyarakat yang menyebutkan bahwa BPD tersebut berjalan dan telah melakukan fungsinya, serta hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua LPM dan 2 orang Tokoh masyarakat menyebutkan bahwa BPD Desa Tanjung memang belum berjalan dengan baik. Namun, disisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dari hasil wawancara yang telah dilakukan berdasarkan responden Ketua BPD dan anggotanya menyebutkan bahwa mereka telah menjalankan semua fungsinya dengan baik.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada seluruh anggota BPD agar lebih mensosialisasikan peraturan desa yang berlaku, apapun hasilnya biar masyarakat di desa Tanjung Koto Kampar Hulu mengetahui dan bisa dipatuhi secara bersama. Apalagi biar masyarakat mengetahui perkembangan desa yang terjadi sekarang ini, bersikaplah secara transparansi kepada masyarakat sekitar.
- b. Diharapkan kepada seluruh anggota BPD agar lebih meningkatkan lagi penggalian dan menyerap aspirasi masyarakat desa agar keinginan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat desa.
- c. Kurangnya fasilitas penunjang membuat BPD menjadi terhambat menjalankan fungsinya. Maka diharapkan pemerintah desa dapat membangun Kantor BPD atau membangun gedung aula serbaguna yang layak untuk kegiatan rapat atau musyawarah desa.
- d. Diharapkan Pemerintah Desa mampu melakukan transparansi keuangan desa terhadap BPD dan masyarakat desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan Terjemahan

Amasri, Muammar. 2018. *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cahaya Firdaus Design. Pekanbaru

Atikunto S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung : alfabeta.

Josef riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo. Jakarta

Idrus Muhammad. 2009. *Metode Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga. Yogyakarta

Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta

Nurmansyah. 2017. *Analisis Pelaksanaan Pengawasan BPD di desa Tasik Serai Kec. Pinggir*. Skripsi Administrasi Negara

Septiady Dedy. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung

Pulungan Suyuti. 2002. *Fiqh Siyasah (ajaran, sejarah, dan pemikiran)*. PT. Raja Grafindo. Jakarta

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Widjaja. 2003. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. PT. Raja Grafindo. Jakarta

Widjaja. 2001. *Pemerintahan Desa/marga berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. PT. Raja Grafindo. Jakarta

Yandianto. 2000. *Kamus Bahasa Indonesia*. M25. Bandung

Undang – undang Dasar 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
 Permusyawaratan Desa
<https://dalamislam.com/info-islami/keutamaan-musyawarah-dalam-islam>
 (diakses pada tanggal 13 Oktober 2019, pukul 20.05 wib)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian : **Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**
di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Keterangan :

1. Wawancara ini hanya untuk melengkapi yang sedang dikerjakan dan ini hanya merupakan karya ilmiah
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan tidak ada pengaruhnya terhadap pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara/i
3. Atas partisipasi dan kerjasama yang Bapak/Ibu/Saudara/I saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga Bapak/Ibu/Saudara/I selalu dalam lindungan Allah swt

Identitas Peneliti:

Nama : AnnisaRahmawani
Nim : 11675200353
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : EkonomidanIlmuSosial
Universitas : UIN Suska Riau Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IDENTITAS RESPONDEN

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Alamat :

a. Menetapkan Peraturan Desa

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/I tentang BPD merumuskan peraturan desa bersama perangkat desa dan masyarakat?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/I tentang BPD mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I rapat membuat Peraturan Desa BPD melibatkan masyarakat?
4. Apakah dalam merancang Peraturan Desa tersebut, menurut Bapak/Ibu/Saudara/I BPD telah menetapkan segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I Peraturan Desa yang telah ditetapkan BPD bersama Kepala Desa di sosialisasikan oleh BPD ke masyarakat?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/I tentang BPD turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat ?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I BPD selalu mencatat semua aspirasi masyarakat ?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I aspirasi masyarakat di tindaklanjuti oleh BPD atau tidak ?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/I ketua BPD mengkoordinasi anggota BPD tentang jadwal pelaksanaan dari aspirasi masyarakat ?
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/I tentang BPD melakukan koordinasi dengan perangkat desa ?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/I tentang BPD melaksanakan kepentingan masyarakat ?
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/I tentang BPD melakukan rapat ulang jika pelaksanaan aspirasi belum terealisasi ?

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

1. Bagaimana kinerja pemerintah desa selama ini ?
2. Bagaimana hubungan kerjasama antar BPD dengan Kepala desa ?
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I apakah BPD mengawasi tentang APBDes ?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/I BPD mengawasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa ?
5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I apakah yang menjadi kendala atau hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi



Foto bersama Bapak Sutomi selaku Kepala desa di Desa Tanjung



Foto bersama Bapak Rusli Zainal selaku Sekretaris desa di Desa Tanjung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Bapak Iyon Supri Datuk Naro selaku Ninik Mamak (Pucuk adat) di Desa Tanjung



Foto bersama Bapak Katon S.HI Datuk Sajelo selaku Ninik Mamak (Ninik 4 suku) di Desa Tanjung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Bapak Syahrial selaku anggota BPD Di Desa Tanjung



Foto bersama Ibu Nurbaiti selaku anggota BPD di Desa Tanjung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Bapak Gussandri selaku Tokoh Masyarakat (Ketua LPM)



Foto bersama Bapak Jamahar selaku masyarakat dusun 4



Hak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7411/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 6 Desember 2019 M
9 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Propinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Annisa Rahmawani
NIM. : 11675200353
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,
PDR. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



Hak

©

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/28696
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7411/2019** Tanggal 6 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | ANNISA RAHMAWANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11675200353 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak

©

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
DESA TANJUNG

JL. PASAR TANJUNG No. 01

Kode Pos 28453

SURAT IZIN MELAKSANKAN RISET

Nomor : 070/TJ-KTKH/2019/04

Kepala Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, setelah membaca Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, Nomor : 070/KKBP/2019/1115 Tanggal 18 Desember 2019 dengan ini memberikan Izin Kepada :

Nama	: ANNISA RAHMAWANI
NPM	: 11675200353
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	: S 1
Lokasi Penelitian	: DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
Judul Penelitian	: PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR.

Untuk melaksanakan kegiatan Riset / Penelitian dan Pengumpulan data untuk bahan skripsi.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

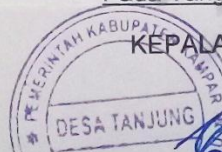
1. Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terma kasih.

Dikeluarkan di : T A N J U N G

Pada Tanggal : 30 Desember 2019

KEPALA DESA TANJUNG





Hak

©

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/1115

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/28696 tanggal 11 Desember 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : ANNISA RAHMAWANI |
| 2. NIM | : 11675200353 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : KANTOR DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 18 Desember 2019

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta



RIWAYAT HIDUP

Annisa Rahmawani, dilahirkan di Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 1998. Anak pertama dari dua bersaudara, pasangan dari Abdul Rahman dan Kliwalni. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 051 Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang dan tamat pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Johan Sentosa dan selesai pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Bangkinang dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara (ANA).

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dan Penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Penulis melakukan penelitian di Desa Tanjung dengan Judul **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”**. Hasil Penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah (Oral Komprehensif) pada tanggal 23 April 2020 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dan Alhamdulillah Penulis dinyatakan lulus dengan prediket memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)